

## **Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat (UKM) Di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan**

*Rofel Gabriel Polii<sup>1</sup>*  
*Sarah Sambiran<sup>2</sup>*  
*Sofia E. Pangemanan<sup>3</sup>*

*Email Korespondensi: Gabrielpolii1209@gmail.com*

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah masyarakat di Kecamatan Amurang kabupaten minahasa selatan. Dalam menumbuhkan perekonomian nasional diperlukan peranan industri kecil dan menengah sesuai yang ditetapkan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya kecamatan amurang kabupaten minahasa selatan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM dimana daerah tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Sulawesi utara, untuk itu pentingnya pemberdayaan bagi pelaku UMKM oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produktivitas Kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik, Pandemi covid-19 menjadi salah satu masalah dalam pemberdayaan UMKM di Minahasa selatan termasuk di Kecamatan Amurang, selain itu Masih kurangnya jumlah pegawai yang bekerja mengimplementasi program dan kurangnya sarana prasarana pendukung.

**Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UMKM**

<sup>1</sup> *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>2</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

<sup>3</sup> *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

*Sekretariat:*

*Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

## Pendahuluan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Minahasa Selatan memiliki program dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang salah satunya telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang meningkat modal usahanya.
2. Mewujudkan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berprestasi.
3. Mewujudkan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)
4. Mewujudkan kemitraan UKM dan SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas

Namun keberadaan dari UKM ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut data awal yang peneliti dapatkan dari Bidang UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan, permasalahan UKM berkaitan dengan kurangnya sumberdaya pegawai dinas, permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang professional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki pelaku UKM. Melihat permasalahan yang dihadapi UKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Minahasa Selatan yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat. Selain permasalahan teknis juga dikarenakan UKM ini masih belum bisa bersaing secara kompetitif dengan para pelaku ekonomi lainnya. Beberapa persoalan yang di hadapi UKM sehingga sulit berkembang antara lain :

1. Ketidakmampuan dalam manajemen;
2. Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan;
3. Kurang berpengalaman;
4. Lemahnya pengawasan keuangan;
5. Kurangnya penyuluhan kepada para pelaku UKM

Sejalan dengan itu maka besarnya UMKM membawa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan terutama dari sisi dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan

lingkungan. Oleh karena itu maka kendali UMKM cukup penting dalam rangka penanaman modal di daerah melalui aspek proses perizinan yang selama ini masih menjadi masalah diantaranya disebabkan oleh:

- a. Kesulitan investor dalam mencari lokasi yang strategis yang salah satu penyebabnya adalah daerah belum memiliki database yang valid dan akurat sebagai parameter untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penentuan lokasi dan penanaman modal. Disamping itu belum tersedianya rencana detail atau teknis tata ruang sebagai penjabaran kebijakan rencana tata ruang RT, RW. Disamping itu penentuan lokasi harus sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri.
- b. Kendala terhadap pelayanan terhadap pengurusan Izin yang terkadang prosedurnya berbelit-belit waktu lama dan tak memiliki standar. Hal ini dimungkinkan pula terjadi karena kurangnya pemahaman investor dalam pengurusan perizinan. Selain itu adanya persyaratan tambahan pemerintah daerah melalui pemberian izin prinsip. Hal lain karena pengurusan perizinan harus melalui banyak lembaga misalnya (Kantor Pertanahan, Dinas PU, Dinas Tata Kota, kehutanan, kebebasan lahan). Apabila kegiatan UKM itu merupakan lintas kabupaten dan kota maka pengaturan perizinan biasanya tidak ada koordinasi antara kabupaten dan propinsi yang berimplikasi terhadap sulitnya atau berbelit-belitnya dalam bidang perizinan.

Dari data awal diatas mengenai tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, maka kinerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan sangatlah penting untuk diperhatikan dan dijalankan agar supaya tujuan dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujud secara optimal.

Kecamatan Amurang merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten minahasa selatan yang memiliki lokasi yang

strategis dan juga memiliki jumlah UKM yang banyak dimana lokasi ini memiliki pasar, terminal dan pertokoan sehingga tidak heran banyak masyarakat yang berusaha melalui usaha kecil dan menengah bahkan usaha yang berskala besar. Namun meskipun memiliki letak yang strategis namun tidak lepas juga dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas.

Kinerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Minahasa berdasarkan tugas dan fungsinya salah satunya adalah memberdayakan usaha kecil dan menengah, namun pada pelaksanaannya memiliki beberapa hambatan baik dalam maupun dari luar instansi tersebut. Dari berbagai pengalaman dan data awal peneliti dilapangan, maka dapat dilihat kinerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah kabupaten Minahasa Selatan belum maksimal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil lokasi di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.

Fokus penelitian yaitu bagaimana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah di Minahasa Selatan khususnya di Kecamatan Amurang agar supaya pelaku-pelaku UKM dapat terus mengembangkan setiap usaha masing-masing pelaku UKM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2008:45) tentang kinerja organisasi khususnya :

- Responsibilitas
- Produktivitas Kerja

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Minahasa Selatan
2. Kepal bidang UKM
3. Pelaku UKM di Kecamatan Amurang

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

## Pembahasan

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Penilaian organisasi adalah kegiatan membandingkan antara hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Perbaikan kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting karena berhubungan erat dengan kepentingan orang banyak sehingga memerlukan penanganan yang serius untuk dapat menghasilkan pelayanan yang optimal. Perbaikan kinerja akan memiliki implikasi yang luas terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perbaikan kinerja pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki kembali citra pemerintah di mata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Pelayanan optimal diwujudkan dalam suatu bentuk kinerja organisasi yang mana di dalam kinerja tersebut memuat indikator-indikator yang

digunakan sebagai tolok ukur keberhasilannya.

## 1. Produktivitas Kerja

Produktivitas dapat dipahami sebagai rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, konsep produktivitas dibahas mengenai sejauhmana pemberdayaan UKM sektor di Kecamatan Amurang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan bagaimana hasil pemberdayaan yang dirasakan oleh pengusaha UKM di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yaitu dengan cara membandingkan prosedur atau target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kenyataan yang dijalankan di lapangan, apakah sesuai target atau tidak.

Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan merupakan lokasi penelitian ini selain itu dinas koperasi dan UMKM adalah pelaksana kebijakan terkait pemberdayaan UMKM di kabupaten Minahasa Selatan. Dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa beberapa rencana strategis telah ditetapkan oleh dinas koproasi dan UMKM dalam pemberdayaan masyarakat seperti pemberian bantuan kredit bagi usaha, pemberian bantuan pada masa covid-19 bagi para pelaku UMKM yang juga merupakan program nasional

UKM memiliki daya tahan yang lebih terhadap berbagai kondisi perekonomian yang terjadi. Hal ini telah dibuktikan saat Indonesia dihantam krisis moneter tahun 1997, sektor usaha kecil menengah (UKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menjadi penyelamat ekonomi nasional, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kabupaten industri, dan perdagangan setiap tahunnya banyak menarik pendatang untuk mencari pekerjaan yang menyebabkan meningkatnya suplai tenaga kerja. Eksistensi UKM khususnya UKM di Kabupaten Minahasa Selatan berpotensi untuk tumbuh

dan berkembang khususnya di Kecamatan Amurang yang merupakan pusat bisnis. Hal ini didasarkan pada fakta di lapangan yang menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Pada masa krisis hingga saat ini apalagi saat pandemic covid-19, sektor UKM menjadi alternatif bagi pemenuhan kesempatan kerja dari sekian banyak suplai tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah terutama unttuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, dalam perkembangannya UKM juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan, mempunyai tanggung jawab teknis bagi pemberdayaan UKM di Kabupaten Minahasa Selatan melalui berbagai macam program-program kerja atau kegiatan-kegiatan operasional dalam pemberdayaan UKM. Dalam usaha pemberdayaan UKM, diperlukan kinerja yang baik dari Dinas Koperasi dan UKM untuk mewujudkan UKM agar terus maju dan berkembang. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi dan UMKM telah memiliki berbagai program dan rencana yang akan dilaksanakan, walaupun dalam perjalanannya tidak terlepas dari adanya faktor penghambat. Faktor penghambat adalah faktor yang harus segera diatasi. karena dapat mengganggu berjalannya program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM. Faktor penghambat disini, tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UMKM saja, tetapi juga berpengaruh pada eksistensi UKM itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang didapati dari hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa produktivitas kerja organisasi dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan, berjalan dengan baik, dimana terdapat beberapa kegiatan menyangkut pemberdayaan usaha kecil menengah dan dapat dirasakan oleh para pelaku UKM.

## 2. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Daya tanggap (*responsiveness*) Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah "suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan". Sedangkan menurut Parasuraman dalam tjiptono (1998:69) salah satu dimensi dalam melihat kualitas suatu pelayanan adalah *Responsiveness* (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada masyarakat.

Responsibilitas atau daya tanggap dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana dinas koperasi dan UMKM peka terhadap permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Amurang. Dari hasil penelitian terlihat bahwa responsibilitas yang ditunjukkan oleh dinas cukup baik dengan pelaksanaan pemberian bantuan UMKM bagi pelaku UMKM pada masa covid-19 dan juga turun ke lapangan untuk sosialisasi terkait bantuan bagi pelaku UMKM.

## **Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan**

### **1. Faktor Penghambat**

- a. Pandemi Covid-19
- b. Mayoritas UKM bergerak dalam sektor informal tanpa dukungan perijinan usaha sehingga UMKM sulit bersaing dalam mekanisme pasar.
- c. Terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi,

sarana prasarana dan informasi pasar.

- d. Kurang tumbuhnya penciptaan wirausaha baru disebabkan pola pikir dan peluang usaha terhadap jiwa kewirausahaan masih rendah.
  - e. Masih rendahnya kompetensi para pengelola UKM.
  - f. Kecintaan masyarakat terhadap produk daerah sendiri masih kurang.
- ### **2. Faktor Pendorong**
- a. Dukungan Pemerintah Pusat melalui bantuan dana pada masa covid-19
  - b. Tersedianya dukungan pelatihan SDM UKM baik dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM maupun APBD Provinsi Sulawesi Utara melalui Balai Diklat untuk meningkatkan kompetensinya.
  - c. Adanya bantuan peralatan dan bahan bagi UKM untuk memulai usahanya dengan tujuan menjadi UKM mandiri.
  - d. Fasilitasi pengenalan produk melalui pameran baik di dalam maupun luar daerah dengan tujuan dapat dikenalnya produk UKM oleh masyarakat luas.

Adanya fasilitasi klinik konsultasi bisnis bagi UKM yang ingin berkonsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi seperti permodalan, jaringan pemasaran, produksi dan bahan.

Selain beberapa hal di atas, ada juga beberapa isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah yang masih akan dikerjakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Selatan yakni :

1. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha UKM dengan hasil produk makanan dan minuman yang masih belum mempunyai PIRT, HAKI dan Ijin Usaha (SIUP/TDP) sehingga tidak dapat menerobos Pasar Modern yang lebih banyak dikunjungi oleh masyarakat;
2. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam pengenalan produk UKM baik di pasar regional maupun nasional yang bisa akses secara tradisional berupa promo, penyediaan space pada Pasar Modern

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- maupun teknologi informasi (website UKM)
3. Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku UKM dalam mengolah limbah UKM menjadi produk bernilai ekonomis melalui pemberdayaan masyarakat sekitar.
  4. Masih lemahnya pelaku UKM skala mikro dalam akses permodalan dengan atau dengan Koperasi maupun CSR untuk pengembangan sector ekonomi produktif;
  5. Masih lemahnya fasilitasi pemerintah dalam mendorong produktifitas usaha melalui bantuan alat produksi;
  6. Masih lemahnya pemahaman pelaku UKM dalam kemitraan baik bersifat SDM, bahan, produksi, permodalan maupun pasar;
  7. Masih rendahnya ketrampilan SDM sektor Industri olahan dalam hasil kerajinan maupun makanan dan minuman sehingga kalah dalam persaingan global.

Dari beberapa faktor -faktor penghambat Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan pelaku UKM di Minahasa selatan, peneliti menyimpulkan bahwa, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan masyarakat, yang juga tidak ditunjang dengan kuantitas sumberdaya manusia yang memadai dan sarana, prasarana yang masih kurang, dibutuhkan waktu yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Produktivitas Kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana terlihat adanya beberapa program seperti Gebyar UKM di Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM
2. Responsibilitas Dinas Koperasi dan UMKM bagi pelaku UKM di

Kabupaten Minahasa Selatan dijalankan dengan baik, hal ini terlihat Di Kecamatan Amurang rencana strategis tersebut berjalan dengan baik, terbukti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha di Kecamatan Amurang.

3. Pandemic covid-19 menjadi salah satu masalah dalam pemberdayaan UMKM di Minahasa selatan termasuk di Kecamatan Amurang, selain itu Masih kurangnya jumlah pegawai yang bekerja mengimplementasi program dan kurangnya sarana prasarana pendukung di Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa selatan menjadi salah satu kelemahan dalam pemberdayaan pelaku UKM.

### Saran

1. Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah di Kabupaten Minahasa Selatan untuk memberikan pelatihan bagi pelaku usaha di kecamatan amurang untuk mengembangkan diri mereka mengingat potensi yang besar yang dimiliki oleh wilayah tersebut.
2. Disarankan juga dilakukan seminar yang mampu menambah pengetahuan pelaku usaha serta merangsang calon pengusaha untuk berani membuat usaha, selain itu perlu juga komitmen pemerintah daerah dalam mengucurkan dana tambahan untuk peminjaman modal usaha yang dikelola secara profesional.
3. Perlu adanya penambahan pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Minahasa selatan yang menjadi salah satu kelemahan dalam pemberdayaan pelaku UKM, selain itu juga pimpinan dinas perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang dalam pekerjaan pegawai seperti ruangan kerja yang representative dan kondusif serta ketersediaan kertas, tinta, computer dan alat tulis kantor lainnya.

### Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada).
- Adi , M. Kwartono. 2007. Analisis Usaha

# EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- Kecil Dan Menengah, Penerbit CV.Andi Offset, Yogyakarta
- Agus Dwiyanto. 2008. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta
- Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Barata, Atep Adya. 2004. Dasar – Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Fahmi, Irham. 2007. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, James L, Ivancevich, John M and Donnely Ir, James H, 2008, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, edisi delapan, penerjemah Nunuk Adriani, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008.Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendri, Ma’ruf, 2006, Pemasaran Ritel, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Henry Simamora, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Ilyas, Yaslis, 2005, Kinerja Teori, Penilaian dan Penelitian, Jakarta: Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Jakarta Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
- Miles, M. B. dan Huberman, M. A. 2008. “Qualitative Data Analysis”.
- Noor, Ida R., Setyawati, Lugina. 2010. Pemberdayaan UKM: Catatan Refleksi Hasil Meta Riset.Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 15, No. 1, Januari 2010 : 39-58. Jakarta,Labsosio FISIP-UI
- Rudjito. 2003. Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis, Makalah Yang Di Sampaikan Pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI.
- Ruky. A.S. 2006, Sistem Manajemen Kinerja , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama
- Rukminto, Bachtiar. 2008. Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat. (Online). www.ejournal.unair.ac.id. Diakses pada tahun 2014
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, Pemberdayaan Masyarakat, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006
- Sedarmayanti, 2007. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, yayasan Dian Desa.
- Simamora H. 2004.Manajemen sumber Daya Manusia, Cetakan Ketiga, Penerbit STIE YKPN –Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam era Otonomi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja. Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta
- Sumodingningrat.2004. Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.Yogyakarta: Gava Media.
- Timple, A. Dale. 1992. Kinerja Pegawai Pemerintah. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Tribun Manado. 2018. Gebyar UKM Minahasa Selatan untuk kemajuan usaha, 10 Oktober
- Sumber Lain :  
UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).  
Tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah